



BANK NIAGA MANDIRI
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

LAPORAN TATA KELOLA (GCG)

PERIODE TAHUN 2025

PT BPR NIAGA MANDIRI

Komp. Pertokoan Malabar Permai, Blok C. 14-16 Jl. Palem Raya Kel.
Cibodasari, Kec Cibodas Perumnas I, Tangerang

**BPR NIAGA MANDIRI
PERIODE TAHUN 2025**

COVER	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A KATA PENGANTAR DIREKSI	3
B PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN	3
BAB II POKOK LAPORAN	4
A RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA	4
B PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA	4
C KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR	10
D KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA	11
DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN	
E HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN	11
KOMISARIS PADA BPR	
F HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN	12
KOMISARIS PADA BPR	
G PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI	13
DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS	
H RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH	13
I PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN	14
J KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT DEKOM	19
K JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	19
L PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	20
M TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	20
N PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN	20

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR PT. BPR NIAGA MANDIRI TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. KATA PENGANTAR DIREKSI

Pada tahun 2025 dan kedepannya, BPR Niaga mandiri bertekad untuk terus meningkatkan kerangka tata kelola kami agar selaras dengan praktik terbaik dalam menjalankan perusahaan dan persyaratan regulasi. Kami berfokus pada penguatan kontrol internal, peningkatan proses manajemen risiko, serta memastikan bahwa pengambilan keputusan dipandu oleh prinsip-prinsip etika dan dengan integritas tertinggi dan hal ini kami lakukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, nasabah, karyawan dan masyarakat sekitar kantor BPR Niaga mandiri beroperasi.

Komponen penting dari komitmen tata kelola yang dijalankan oleh BPR Niaga mandiri adalah faktor kepercayaan yang kami masukkan dalam perencanaan strategis dan operasional. Kami menempatkan berkelanjutan sebagai bagian dari inti dibisnis kami, memastikan bahwa tindakan kami memberikan kontribusi positif terhadap lanskap ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini mencakup penilaian risiko persaingan usaha yang ketat, inisiatif keuangan berkelanjutan dan fokus nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan kami.

Dalam semua upaya kami, BPR Niaga mandiri tetap berfokus untuk melayani kepentingan para pemangku kepentingan secara luas dengan melakukan transparansi, praktik bisnis yang beretika dan pengelolaan sumber daya manusia yang bertanggung jawab. Seiring dengan perkembangan dan perlunya adaptasi terhadap tantangan dan peluang dimasa depan, komitmen kami terhadap tata kelola perusahaan yang kuat akan tetap terjaga menjadi panduan kami dalam membangun organisasi yang berkelanjutan dan tangguh serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak.

Di BPR Niaga mandiri, kami sangat berkomitmen untuk menegakkan standar tertinggi tata kelola perusahaan sebagai bagian dari landasan utama operasional kami. Komitmen ini didorong oleh keyakinan yang kuat bahwa praktik tata kelola yang kokoh adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan, memastikan keberlanjutan jangka panjang dan membangun budaya transparansi serta akuntabilitas diseluruh organisasi perusahaan.

B. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Untuk mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, BPR Niaga mandiri berpegang pada prinsip-prinsip dasar tata kelola sesuai pedoman GCG yaitu Perilaku beretika, Akuntabilitas, Transparansi dan berkelanjutan.

BAB II
POKOK LAPORAN

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Komp. Pertokoan Malabar Permai Blok C14-16, Jl. Palem Raya Kel. Cibodasari, Kec. Cibosas Perumnas 1 Kota Tangerang
Nomor Telepon	021 - 55656895
Penjelasan Umum	Tata kelola di BPR Niaga Mandiri telah berjalan dengan baik, Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Standar Operasional Prosedur telah ada dan dilakukan oleh setiap unit kerja.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Penerapan Tata Kelola di BPR Niaga Mandiri sudah berjalan baik dan benar tetapi tetap harus ditingkatkan. Masih terdapat beberapa kekurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaannya tetapi pelanggaran tersebut tidak signifikan dan berpengaruh terhadap keuangan BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK*)	3275022607610008
	Nama	Parlindungan Simanjuntak
	Jabatan	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan; c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: 1. Fungsi audit intern; 2. Fungsi manajemen risiko; dan 3. Fungsi kepatuhan

		<p>e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan 2. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. <p>g. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;</p> <p>i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;</p>
2	NIK*)	3674025607700013
	Nama	Anjar Widanarti
	Jabatan	Direktur Bisnis
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	<p>a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR;</p> <p>b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>d. Meningkatkan volume kredit (lending) dan menghimpun dana pihak ketiga (funding) secara efektif untuk mendukung likuiditas BPR.</p> <p>e. Mengawasi kualitas kredit (NPL) dan memastikan proses analisa kredit sesuai prosedur.</p> <p>f. Memastikan seluruh kegiatan bisnis mematuhi peraturan perundang-undangan dan OJK;</p> <p>g. Mengevaluasi kinerja tim marketing/bisnis dan memastikan kualitas SDM memadai</p>

		<p>h. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;</p> <p>j. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;</p>
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris***)	Rekomendasi dari Dewan Komisaris telah dilakukan dan dilaporkan kembali.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK*)	3175022503530001
	Nama	Drs. Basirun Sianipar, MM
	Jabatan	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	<p>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi,</p> <p>c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR,</p> <p>d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan 2. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. <p>e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p>

		f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 1) 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR
2	NIK*)	3674035502630002
	Nama	Ida Mariska Silalahi
	Jabatan	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	Membantu Komisaris Utama untuk : a. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. b. Dalam melaksanakan pengawasan, untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. c. Dalam melaksanakan pengawasan, mengingatkan Komisaris Utama bahwa dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan : 1) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. 2) Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. d. Turut melakukan pengawasan terhadap : 1) Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan 2) Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perekonomian rakyat.

		e. Turut melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas : 1) Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern; dan 2) Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
	Rekomendasi kepada Direksi	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Program Kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah Rapat	-
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Program Kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah Rapat	-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Program Kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah Rapat	-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Program Kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah Rapat	-
5	Komite Kredit**)	
	Tugas dan Tanggung Jawab	Meninjau, menilai dan memutuskan permohonan pembiayaan untuk calon Debitur, serta menilai manajemen risiko dari kredit tersebut.
	Program Kerja	Menciptakan kredit yang sehat sesuai dengan Tata kelola yang baik.
	Realisasi	Setiap ada pengajuan kredit

	Jumlah Rapat	Sepanjang tahun
--	--------------	-----------------

Keterangan :

Untuk komite lainnya belum ada karena BPR Niaga mandiri dengan modal inti masih dibawah Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

“BAGIAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK*)	Nama	Keahlian (**)	Komite(***)					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	Manajemen Risiko	Komite Kredit	
1	3674025607700013	Anjar Widanarti	Dir. Bisnis	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Ketua	Tidak
2	3175022304790010	Saut Manutur Tambunan	Manajer Kredit	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Anggota	Tidak
3	3603122610750001	Zainal Simanjuntak	Manajer Operasional	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Anggota	Tidak
4	1601221212800003	Paris	AO Kredit	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Anggota	Tidak
7	3275022607610008	Parlindungan Simanjuntak	Dir. Kepatuhan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Pengamat	Tidak
10	3671064208830001	Sri Rahmawati	PE Manajemen Risiko	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Pengamat	Tidak

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
1	3275022607610008	Parlindungan Simanjuntak	PT. BPR Niaga Mandiri	22%	22%
2	3674025607700013	Anjar Widanarti	PT. BPR Niaga Mandiri	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
1	3175022503530001	Drs. Basirun Sianipar, MM	PT. BPR Niaga Mandiri	78%	78%
2	3674035502630002	Ida Mariska Silalahi	PT. BPR Niaga Mandiri	Tidak Ada	Tidak Ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain*) /(**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3275022607610008	Partindungan Simanjuntak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3674025607700013	Anjar Widanarti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain*)/(**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3175022503530001	Drs. Basirun Sianipar, MM	601319	PT. BPR Gracia Mandiri	73.08%
2	3674035502630002	Ida Mariska Silalahi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3275022607610008	Partindungan Simanjuntak	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2	3674025607700013	Anjar Widanarti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
---	------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3175022503530001	Drs. Basirun Sianipar, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	3674035502630002	Ida Mariska Silalahi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

• Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3275022607610008	Parindungan Simanjuntak	Tidak ada	Saudara Ipar	Saudara Ipar
2	3674025607700013	Anjar Widanarti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

• Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3175022503530001	Drs. Basirun Sianipar, MM	Saudara Ipar	Tidak ada	Saudara Ipar
2	3674035502630002	Ida Mariska Silalahi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji*)	2	396.000.000	2	276.000.000
2	Tunjangan	2	194.025.000	2	105.025.000
3	Tantem	-	-	-	-
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya**)	-	-	-	-
	Total Remunerasi		590.025.000		381.025.000
	Jenis Fasilitas Lain				
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	-	-	-	-
3	Asuransi kesehatan	4	45.336.400	3	42.335.400
4	Fasilitas lainnya***)	-	-	-	-
	Total Fasilitas Lain		45.336.400		42.335.400
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		635.361.400		423.360.400

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *)	Perbandingan **)	
	(a / b)	
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)		2,77
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)		1,33
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)		1,32
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)		1,55
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)		2,48

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	20 Januari 2025	2	<ul style="list-style-type: none"> • RBB tahun 2024 kuartal III dan IV menjadi tolak ukur bagi Manajemen BPR untuk merealisasikan Pencapaian Kinerja • Posisi Direktur Bisnis sudah terisi • Mengarahkan Direksi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pengarahan Direksi dan mengikuti Pelatihan pelatihan baik internal maupun eksternal • Perhatian terhadap pengurangan kredit bermasalah dan upaya untuk pertumbuhan kredit agar mengalami peningkatan • Hasil Evaluasi Dekom terkait Realisasi RBB kuartal IV/SM II tahun 2024 masih menunjukkan pertumbuhan . • PT. BPR Niaga Mandiri di Tahun 2024 telah mengikuti sertakan SDM untuk mengikuti pelatihan terkait APU PPT & P2SM baik secara internal maupun eksternal.
2	23 April 2025	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Mengenai strategi Rencana Bisnis BPR (RBB) tahun 2025, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Penyaluran Kredit 2. Strategi Penyelesaian Permasalahan Strategis BPR 3. Strategi Pemenuhan Kelentuan BPR • Isu Isu Strategis yang membahas Rencana merger BPR Niaga Mandiri dengan BPR Gracia Mandiri masih dalam proses mengingat masing-masing BPR masih terus berusaha untuk memperbaiki kinerjanya sehingga diharapkan memberikan hasil yang membaik saat dilakukan merger. • Evaluasi terkait kebijakan strategis BPR sebagai berikut:

		<p>1. BPR senantiasa melakukan perekrutan tenaga marketing tetap maupun free lance, tetapi bagi yang tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan maka tidak dapat berlanjut. Namun demikian manajemen BPR terus mencari peluang-peluang kredit baru yang dapat digarap bersama BPR maupun dengan kerjasama instansi tertentu.</p> <p>2. Penyelesaian kredit bermasalah (kredit yang sudah NPL), Kredit Hapus Buku maupun AYDA tetap dilakukan namun masih relatif kecil kontribusinya terhadap pendapatan. Kerjasama dengan jasa penagihan eksternal telah dilakukan melalui kantor Lawyer Pane. Namun masih sebatas perijajagan secara legalitas hukum. Adapun untuk pembelian AYDA baru 1 jaminan nasabah yang telah terjual selebihnya masih terus dipasarkan.</p> <p>3. Penerapan CKPN berdampak pada kerugian BPR maka perlu adanya peningkatan volume kredit yang berkualitas sehingga dapat menurunkan NPL disamping adanya penyelesaian kredit bermasalah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis 2025 adalah <p>Hasil evaluasi rencana & realisasi RBB tersebut diatas secara umum realisasi RBB di bulan Maret 2025 mencapai sekitar 90 % dari RBB, namun adanya kerugian yang dialami BPR terkait penerapan CKPN mendorong manajemen untuk meningkatkan volume kreditnya serta penyelesaian kredit bermasalah sehingga dapat memberikan kontribusi keuntungan bagi BPR untuk ke depannya. Dengan demikian diharapkan NPL dapat menurun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkenaan dengan APU/PPT & P2SPM untuk BPR Niaga Mandiri sejauh ini tidak ada temuan transaksi yang mencurigakan dan transaksi nasabah sebagian besar dilakukan melalui Bank Umum. SOM yang menangani APU/PPT & P2SPM telah dilikutsertakan berbagai pelatihan terkait dan senantiasa membuat dan mengupdate SOP-SOP yang terbaru. Menurut pemantauan kami SDM yang bersangkutan cukup banyak belajar untuk memahami APU/PPT & P2SPM sehingga menurut penilaian Oekom penanganan APU/PPT & P2SPM di BPR Niaga Mandiri relatif baik.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	14 Juli 2025	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Mengenai strategi Rencana Bisnis BPR (RBB) tahun 2025, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Penyaluran Kredit 2. Strategi Penyelesaian Permasalahan Strategis BPR 3. Strategi Pemenuhan Ketentuan BPR • Pembahasan Isu Isu Strategis, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. pemberian kredit kepada para pensiunan yang dikelola oleh Koperasi. BPR Niaga Mandiri telah melakukan MOU dengan koperasi terkait dan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. 2. Kelengkapan Pejabat Eksekutif (PE) di BPR Niaga Mandiri telah terpenuhi secara struktur organisasi. • Evaluasi/Penetapan Kebijakanaksanaan Strategis, Sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. BPR senantiasa melakukan perkrutan tenaga marketing tetap maupun free lance, tetapi bagi yang tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan maka tidak dapat berlanjut. Namun demikian manajemen BPR terus mencari peluang-peluang kredit baru yang dapat digarap bersama BPR maupun dengan kerjasama instansi tertentu. 2. Penyelesaian kredit bermasalah (kredit yang sudah NPL), Kredit Hapus Buku maupun AYDA tetap dilakukan namun masih relatif kecil kontribusinya terhadap pendapatan. Kerjasama dengan jasa pengihan eksternal telah dilakukan melalui kantor Lawyer Pane. Namun masih sebatas penjadangan secara legalitas hukum. Adapun untuk pembelian AYDA baru 1 jaminan nasabah yang telah terjual selebihnya masih terus dipasarkan. 3. Penerapan CKPN berdampak pada kerugian BPR maka perlu adanya peningkatan volume kredit yang berkualitas sehingga dapat menurunkan NPL disamping adanya penyelesaian kredit bermasalah.
---	--------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR (RBB) tahun 2025 adalah, Hasil evaluasi rencana & realisasi RBB tersebut diatas secara umum realisasi RBB di bulan Juni 2025 perkembangannya mencapai sekitar 90 % dari RBB untuk penghimpunan maupun penyaluran dana. Namun kerugian yang dialami BPR terkait penerapan CKPN mendorong manajemen untuk meningkatkan volume kreditnya serta penyelesaian kredit bermasalah sehingga dapat memberikan kontribusi keuntungan bagi BPR untuk periode berikutnya. Dengan demikian diharapkan NPL dapat menurun. • Pembahasan APU PPT dan P3SPM, adalah Berkenaan dengan APU/PPT & P3SPM untuk BPR Niaga Mandiri sejauh ini tidak ada temuan transaksi yang mencurigakan dan transaksi nasabah sebagian besar dilakukan melalui Bank Umum. SDM yang menangani APU/PPT & P2SPM telah dilikutsertakan berbagai pelatihan terkait dan senantiasa membuat dan mengupdate SOP-SOP yang terbaru. Menurut pemantauan kami.
3	14 Oktober 2025	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Mengenai strategi Rencana Bisnis BPR (RBB) tahun 2025, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Penyaluran Kredit 2. Strategi Penyelesaian Permasalahan Strategis BPR 3. Strategi Pemenuhan Ketentuan BPR • Pembahasan Isu Isu Strategis, adalah Ditengah kondisi perekonomian yang tidak stabil serta persaingan disektor jasa keuangan saat ini, BPR tetap mengusahakan pertumbuhan kreditnya yang berasal dari kredit yang diperoleh dari marketing, kredit sindikasi BPR serta kredit pensunanan dengan porsi kecil (20 %). Kesemuanya ini tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. • Evaluasi/Penetapan Kebijakanaksanaan Strategis, Sebagai berikut:

		<p>a. BPR senantiasa melakukan perekrutan tenaga marketing tetap maupun freelance, tetapi bagi yang tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan maka tidak dapat berlanjut. Namun demikian manajemen BPR terus mencari peluang-peluang kredit baru yang dapat digarap bersama BPR lainnya melalui sinkikasi maupun dengan kerjasama koperasi untuk kredit pension. Dalam kaitan kredit pension ini manajemen telah membatasi pelayanannya untuk jangka waktu 4 tahun tergantung usia. Saat ini porsi kredit pension sekitar 18% dari total kredit seluruhnya.</p> <p>b. Penyelesaian kredit bermasalah (kredit yang sudah NPL), Kredit Hapus Buku maupun AYDA tetap dilakukan namun masih relatif kecil kontribusinya terhadap pendapatan. Kerjasama dengan jasa penagihan eksternal telah dilakukan melalui kantor Lawyer Pane. Namun masih sebatas penajagan secara legalitas hukum. Adapun untuk pembelian AYDA baru 1 jaminan nasabah yang telah terjual selebihnya masih terus dipasarkan.</p> <p>c. Penerapan CKPN berdampak pada kerugian BPR maka perlu adanya peningkatan volume kredit yang berkualitas sehingga dapat menurunkan NPL disamping adanya penyelesaian kredit bermasalah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR (RBB) tahun 2025 adalah, Hasil evaluasi rencana & realisasi RBB tersebut diatas secara umum realisasi RBB di bulan September 2025 dalam perkembangan penghimpunan maupun penyaluran dana secara realisasinya telah melampaui RBB. Namun demikian kerugian yang dialami BPR terkait penerapan CKPN mendorong manajemen untuk meningkatkan volume kreditnya serta penyelesaian kredit bermasalah guna dapat memberikan kontribusi keuntungan bagi BPR untuk periode berikutnya. Dengan demikian diharapkan NPL dapat menurun. • Pembahasan APU PPT dan P3SPM, adalah Berkenaan dengan APU/PPT & P2SPM untuk BPR Niaga Mandiri sejauh ini tidak ada temuan transaksi yang mencurigakan dan transaksi nasabah sebagian besar dilakukan melalui Bank Umum. SDM yang menangani APU/PPT & P2SPM telah
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>dikutsertakan berbagai pelatihan terkait dan senantiasa membuat dan mengupdate SOP-SOP yang terbaru. Menurut pemantauan kami SDM yang bersangkutan cukup banyak belajar untuk memahami APU/PPT & P2SPM sehingga menurut penilaian Dekom penanganan APU/PPT & P2SPM di BPR Niaga Mandiri relatif baik.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT DEKOM

No.	NIK [*])	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran ^{**}) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3175022503530001	Drs. Basirun Sianipar, MM	4	-	100
2	3674035502630002	Ida Mariska Silalahi	4	-	100

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah penyimpangan Internal [*]) (1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh (satuan)							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian ^{**})	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya ^{***})	-	-	-	-	-	-	-	-

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-
--------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penggambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan/Rp)	Keterangan (**)
	NIK(*)	Nama	Jabatan	NIK(*)	Nama	Jabatan			
1									
2									

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial / Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK / NPWP	Jumlah (Rp)

1	04/12/2025	Sosial	Peduli Bencana Alam Sumut	Perbarindo Tangerang	1.000.000
2	05/12/2025	Sosial	Perayaan Natal Perbarindo	Perbarindo Tangerang	1.500.000
3					

Tangerang, 27 April 2026



Parlindungan Simanjuntak
Direktur Utama

Drs. Basirun Siaripar, MM
Komisaris Utama